

**COMPARATIVE STUDY OF AUTHORITY IN LAW ENFORCEMENT FOR  
MATCH FIXING PRACTICE IN FOOTBALL CLUB GAME BETWEEN THE  
FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA (PSSI) AND THE FOOTBALL  
ASSOCIATION (THE FA)**

**ABSTRACT**

*The football industry which has been increasingly advanced and developed has been used by few people to reap profits in ways that are against the law, so this must be prevented. One of the fraudulent practices in football is match fixing. The Football Association (The FA) is a British football federation that has a long history in the UK and is full of experience, so it can be used as a comparison or indicator for the Football Association of Indonesia (PSSI) in assessing and managing all football related matters.*

*The method used in this study is a normative juridical approach that is focused on studying the application of rules or norms in positive law and comparative law which is considered as a way to examine law comprehensively by examining the system, rules, institutions, and legal history. The nature of analytical descriptive research aims to describe the existing phenomena, both natural or man-made phenomena. This research uses the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The type of secondary data obtained from primary legal materials that are authoritative, secondary legal materials such as publications on law that are not official documents. and tertiary legal material, legal information presented through media such as legal dictionaries, encyclopedias, and others.*

*The results of the study concluded that there are similarities and differences related to the legal substance, legal structure and legal culture in the responsibilities of PSSI and The FA in law enforcement against the match fixing. The cause of the practice of match fixing in Indonesia is because the existence of Law Number 11 of 1980 concerning Bribery is considered obsolete so that it is not equivalent to the current FIFA rules. Clubs in Indonesia often make salary arrears which triggers the creation of gaps for the football mafia to be able to fix the match by offering a large amount of money. PSSI does not regulate the act of producing audio content, audio visual which contains actions or words that encourage other people to make bet.*

*Key words:* authority, match fixing, football.

**PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN PERSATUAN  
SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DENGAN THE FOOTBALL  
ASSOCIATION DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK  
PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN KLUB SEPAK BOLA**

**ABSTRAK**

Industri sepak bola yang semakin maju dan berkembang telah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka hal tersebut harus dicegah. Salah satu praktik curang dalam sepak bola adalah pengaturan skor. *The Football Association* (The FA) merupakan federasi sepak bola Inggris yang telah memiliki sejarah sepak bola di negara Inggris yang panjang dan penuh pengalaman, maka itu dapat dijadikan sebagai pembanding atau indikator bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam menilai dan membuat segala sesuatu yang menyangkut sepak bola.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan perbandingan hukum yang dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan menguji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum. Sifat penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder seperti publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum tersier berupa informasi hukum yang tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam tanggungjawab PSSI dan The FA dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor. Penyebab terjadinya praktik pengaturan skor di Indonesia adalah karena keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dianggap sudah cukup tua sehingga tidak setara dengan aturan FIFA saat ini. Klub di Indonesia kerap kali melakukan penunggakan gaji yang menjadi pemicu terciptanya celah bagi para mafia bola untuk bisa mengatur skor dengan menawarkan uang dengan jumlah besar. PSSI tidak mengatur mengenai tindakan produksi konten audio, audio visual yang berisi tindakan atau kata-kata yang mendorong orang lain untuk melakukan taruhan.

Kata kunci: kewenangan, pengaturan skor, sepak bola.

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	21

## **BAB II KEWENANGAN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA DALAM HUKUM INDONESIA**

A. Sejarah Fédération Internationale de Football Association.....	24
B. Tugas dan Wewenang FIFA.....	28
C. Tinjauan Umum Asian Football Confederation Sebagai Confederasi Sepak Bola Asia.....	30
D. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia.....	31
E. Aspek Hukum Kedudukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.....	35
F. Ketentuan Praktik Pengaturan Skor di Indonesia.....	37
G. Regulasi Mengenai Praktik Pengaturan Skor.....	38

## **BAB III KEWENANGAN THE FOOTBALL ASSOCIATION DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA DALAM HUKUM INGGRIS**

A. Tinjauan Umum Union of European Football Association Sebagai Organisasi Sepak Bola Eropa.....	42
B. The Football Association Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Inggris.....	44

C. Aspek Hukum Kedudukan <i>The Football Association</i> .....	47
D. Ketentuan Mengenai Praktik Pengaturan Skor di Inggris.....	49
E. Regulasi Mengenai Praktik Pengaturan Skor.....	50

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DENGAN THE FOOTBALL ASSOCIATION DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN KLUB SEPAK BOLA**

A. Persamaan dan Perbedaan Terkait Kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan <i>The Football Association</i> Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Klub Sepak Bola.....	57
1. Persamaan Terkait Substansi Hukum.....	57
2. Persamaan Terkait Struktur Hukum.....	72
3. Persamaan Terkait Budaya Hukum.....	76
4. Perbedaan Terkait Substansi Hukum.....	77
5. Perbedaan Terkait Struktur Hukum.....	81
6. Perbedaan Terkait Budaya Hukum.....	85
B. Analisa Terkait Kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan <i>The Football Association</i> Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengaturan Skor dan Evaluasi Bagi Hukum Indonesia.....	87

1. Analisa Terkait Kewenangan PSSI dengan The FA Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengaturan Skor.....	87
2. Evaluasi Terkait Hukum di Indonesia.....	90
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

